



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

KOMINFO PROVINSI JAMBI



Website: www.diskominfo.jambi.go.id



Jl. A Yani No.1, Telanaipura, Kec.
Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Rancangan Awal Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 ini dapat tersusun. Rancangan Awal Rencana Strategis adalah dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi untuk 5 tahun ke depan.

Penetapan sasaran strategis adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur yang akan dicapai secara nyata dalam periode 5 tahun ke depan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus spesifik, terinci dan dapat diukur.

Disadari bahwa Rancangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang disusun ini masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan saran / masukkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis yang disusun dapat memberikan manfaat yang baik dan menjadi pedoman / acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan 5 (lima) tahun ke depan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi ini. Masukan, saran dan kritik sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi ini umumnya untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Provinsi Jambi.

Jambi, 19 September 2025

KEPALA DINAS,



Drs. ARIANSYAH, ME

Pembina Utama Madya

NIP. 19720603 199302 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS... ..	11
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	11
2.1.2. Sumber Daya OPD	29
2.1.3. Kinerja Pelayanan OPD	31
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	46
2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	46
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	46
2.2.2. Isu Strategis	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATRGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	49
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	49
3.1.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-Tahun 2029	49
3.1.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	49
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	56
4.2. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif ..	70
4.3. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	70
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	96
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci	97
BAB V PENUTUP	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi. Renstra disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Dokumen ini berperan penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan sektoral dan perencanaan daerah, serta menjadi instrumen utama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Renstra juga mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam merespons isu-isu strategis serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Dinas ini bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Diskominfo berkewajiban mendorong tercapainya sasaran strategis berupa terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital. Selain itu, Diskominfo juga memegang peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui penyediaan akses informasi yang memungkinkan masyarakat turut berperan aktif dalam proses pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, perlu dipertimbangkan dinamika dan tantangan pembangunan yang terus berkembang, termasuk akselerasi transformasi digital di berbagai sektor. Pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif. Transformasi digital bukan hanya menjadi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Oleh

karena itu, arah pembangunan lima tahun ke depan perlu menekankan penguatan sistem pemerintahan digital (*digital government*), integrasi layanan berbasis elektronik, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengarahkan perangkat daerah agar lebih inovatif dan adaptif dalam merespons era digital demi mendukung tercapainya visi pembangunan nasional dan daerah yang berdaya saing.

Diskominfo telah memberikan layanan internet/intranet di seluruh Perangkat daerah di Provinsi Jambi. Saat ini seluruh Perangkat daerah telah tersambung dan dapat terintegrasi dengan portal Intranet/internet dengan bandwidth sebesar 200 Mbps. Selanjutnya kerjasama juga dilakukan dengan PT. Telkom Indonesia untuk mengadakan transpordes dengan bandwidth 4 Mhz untuk mempromosikan program/kegiatan Provinsi sampai ke pelosok pedesaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri dan terintegrasi melalui penayangan siaran TVRI Jambi dan dapat dipergunakan untuk siaran langsung dengan hasil gambar dan suara yang baik.

Diskominfo juga mendorong kebijakan satu data Indonesia dengan menyediakan portal data yang telah terhubung dengan Bappenas RI. Ketersediaan dan pemanfaatan data terus diwujudkan untuk mendukung transformasi digital pemerintah. Keterpaduan data lintas instansi pemerintah untuk mendukung layanan digital nasional serta memudahkan pengambil kebijakan dalam menentukan arah kebijakan. Saat ini terdapat 262 data statistik sektoral dari seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Jambi dan terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik pada Penyediaan data statistik dasar sebanyak 675 data.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka dan transparan. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh predikat "Cukup Informatif", sehingga diperlukan upaya strategis untuk menjamin standar layanan informasi kepada masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Salah satu langkah strategis yang direncanakan adalah penguatan Program Pro Responsif Lapor Wak Dul, yang memberikan akses bagi masyarakat untuk turut berperan dalam pembangunan daerah. Program Lapor Wak Dul diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Salah satu kewenangan lain yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah urusan persandian.

Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan informasi yang dilaksanakan melalui penerapan konsep, teori, dan teknik dari ilmu kriptografi, serta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip profesi persandian. Saat ini, telah terjadi perubahan paradigma dan arah penyelenggaraan persandian di daerah. Persandian tidak lagi terbatas pada kegiatan menerima dan mengirim berita, tidak hanya melayani kepala daerah, dan tidak terbatas pada informasi bersifat rahasia.

Peran persandian dalam pengamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), keaslian (authentication), serta mencegah penyangkalan terhadap informasi (non-repudiation). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peran persandian menjadi semakin penting dalam memberikan jaminan keamanan informasi untuk mendukung terwujudnya ketahanan informasi nasional sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu, dengan terjaminnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah, persandian turut memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi Gubernur Jambi, yaitu: "Terwujudnya Jambi Mantap yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT." Visi ini menekankan pentingnya pembangunan daerah yang kompetitif, berkelanjutan, serta dilandasi oleh nilai-nilai religius. Untuk itu, peran Diskominfo sangat krusial dalam menghadirkan layanan digital yang efisien, pengelolaan informasi yang aman dan terpercaya, serta pemberdayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program strategis Diskominfo secara terarah dan terpadu, guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memperkuat ketahanan informasi sebagai fondasi utama pembangunan Provinsi Jambi ke depan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
22. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
23. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
29. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 47).

1.3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Merupakan satu acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD.
2. Menyediakan satu tolak untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah.
3. Agar lebih dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
2. Mempertegas adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program pembangunan Komunikasi dan Informatika di Jambi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Dokumen Renstra sebagai tolok ukur atau parameter dalam menentukan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Tahunan.
4. Dokumen Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam implementasi pembuatan dokumen rencana kerja dalam menentukan anggaran yang berbasis pada kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Dasar Hukum Penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran layanan, Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah Pelaksanaan dan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di lingkup Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koodinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Untuk melaksanakan tugas Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan, pengelolaan dan penyajian data;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan; dan
- d. menyiapkan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengelolaan arsip dan dokumentasi
- c. melaksanakan urusan dalam, pengamanan dan administrasi perjalanan Dinas;
- d. melaksanakan tata usaha pimpinan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan usulan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai;
- f. menyiapkan bahan sasaran kinerja pegawai dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- h. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas;
- i. menyiapkan bahan penetapan, pengangkatan dan mutasi pegawai lainnya serta penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. mengelola urusan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai di lingkup Dinas;
 - c. mengelola urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan serta laporan barang milik daerah;
 - d. mengelola urusan barang persediaan;
 - e. menyiapkan bahan inventarisasi, penerimaan, pengeluaran, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* serta tata kelola *e-government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Layanan *E-Government* menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Provinsi Jambi;
- d. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pembangunan, pengembangan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya teknologi informatika dan

komunikasi;

- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government*, tata kelola *e-government*;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- c. menyiapkan aplikasi, portal dan situs web pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2) Seksi Pengembangan *E-Government* mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, smart Provinsi, nama domain/sub domain;
- b. menyiapkan bahan supervisi pengelolaan teknologi informasi pada pemerintah Provinsi Jambi sesuai perundang-undangan.
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, smart Provinsi, nama domain/sub domain dan layanan publik;
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, smart Provinsi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik; dan
- e. menyiapkan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3) Seksi Tata Kelola *E-Government* mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (e-government), *government chief information officer*, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata kelola pemerintahan (e-government), pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola pemerintahan (e-government), pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi dan sosialisasi di bidang tata kelola pemerintahan (e-government), pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola pemerintahan (e-government), pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Informasi Publik dan Statistik

Bidang Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan diseminasi dan pelayanan informasi publik dan penanganan aduan masyarakat, pengelolaan dan pengembangan informasi serta pemberdayaan media informasi publik, dan pengelolaan data statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi Publik dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan informasi publik dan Statistik;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang informasi publik;
- c. pengoordinasian kebijakan bidang informasi publik;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi publik;

- e. pelaksanaan layanan hubungan media;
- f. pelaksanaan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
- g. pengoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- h. pengoordinasian pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- i. pengelolaan konten dan perencanaan media informasi publik;
- j. pengelolaan media informasi publik;
- k. pengoordinasian pengelolaan saluran komunikasi media Informasi publik;
- l. pengoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah Provinsi dan non pemerintah Provinsi;
- m. pengoordinasian dibidang pengelolaan informasi dan media publik;
- n. pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik
- o. penyusunan rumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik;
- p. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi publik dan Statistik; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan, pengumpulan dan pengolahan layanan Informasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik;
- c. mengoordinasikan dan mengumpulkan informasi publik dari perangkat daerah;
- d. menyediakan informasi publik berupa informasi berkala dan serta merta ke dalam *website*/papan pengumuman dan informasi publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi *database internal dan/* atau *hardcopy*;
- e. mengoordinasikan PPID Pembantu melalui rapat berkala dan memanfaatkan aplikasi generik atau aplikasi umum yang disediakan oleh pemerintah;

- f. mengelola dan melakukan penyajian data informasi publik;
- g. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi layanan informasi publik;
- i. mengoordinasi dan melakukan kerjasama dengan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
- j. mengoordinasikan dan melakukan sosialisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik pada lembaga dan badan publik;
- k. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan komisi informasi publik (KIP) Provinsi dan melakukan koordinasi dengan komisi informasi pusat;
- l. menyiapkan bahan koordinasi hasil pengelolaan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- m. mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi sengketa informasi publik;
- n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penayangan informasi melalui media cetak maupun elektronik serta media online;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan pemberian reward kepada badan publik yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan layanan informasi publik;
- p. menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik;
- q. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi layanan informasi publik; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Informasi publik dan media sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Informasi publik dan media;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan diseminasi

informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda berdasarkan strategi komunikasi;

- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan media publik;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan media komunikasi publik milik pemerintah daerah;
- f. menyelenggarakan diseminasi pesan di media dan mengevaluasi penggunaan media komunikasi publik;
- g. membuat siaran pers, mengelola ruang pers, dokumentasi dan grafika;
- h. melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pimpinan redaksi dan liputan media;
- i. memantau pemuatan siaran pers di media;
- j. melaksanakan layanan media center, cetak/elektronik, media penyiaran, media daring, media sosial, media dalam dan luar ruang serta komunikasi tatap muka;
- k. menyiapkan bahan koodinasi dengan media publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- l. melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik dengan menyusun strategi komunikasi publik dan pengemasan konten;
- m. menentukan penyajian konten di media cetak, media daring, media sosial, radio, dan televise, serta media luar ruang;
- n. mendiseminasikan konten melalui media yang sudah ditentukan sebelumnya;
- o. memantau pemuatan konten berdasarkan waktu dan frekuensi tayang;
- p. menilai ketepatan pemuatan konten dan mengevaluasi penggunaan media komunikasi publik;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- r. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal dan pembuatan konten lokal;
- s. mengoordinasikan dan melakukan reproduksi informasi nasional;
- t. mengoordinasikan dan melakukan produksi informasi Pemerintah Daerah;

- u. mengoordinasikan dan melakukan menyiapkan konsep saluran komunikasi/media internal;
- v. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis dibidang pengelolaan informasi publik dan media;
- w. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik dan media;
- x. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi publik dan media;
- y. menyiapkan bahan pelaksanaan koodinasi dan kerjasama di bidang informasi publik dan media;
- z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengelolaan informasi publik dan media; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan, pengumpulan dan pengelolaan Data Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data statistik;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengelolaan data statistik;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- e. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan kompilasi data produk administrasi bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil survei pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun statistik pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur

dan kriteria pengelolaan data dan penyusunan statistik pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan hak asasi manusia;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan data dan penyusunan statistik;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan data dan penyusunan statistik; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik dan kemitraan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. pembinaan dan pengembangan strategi komunikasi publik;
- d. pelaksanaan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik dan pemangku kepentingan;
- e. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- f. pengoordinasian kebijakan pemberdayaan sumber daya dan lembaga komunikasi publik serta pemangku kepentingan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
- h. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan komunikasi publik; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi opini dan aspirasi publik sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. menyiapkan bahan koodinasi, dan melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- d. mengumpulkan data, mengoordinasikan, menganalisa dan melakukan pemantauan dan pengelolaan aduan masyarakat serta membuat rekomendasi termasuk isu terindikasi krisis;
- e. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- f. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengelolaan opini dan aspirasi publik Pemerintah Daerah;
- g. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pemantauan Isu Publik di media massa dan sosial dengan mengumpulkan, menganalisa dan membuat rekomendasi atas hasil analisis termasuk isu terindikasi krisis;
- h. melakukan pengumpulan data, mengolah dan menganalisa serta mengidentifikasi, merumuskan masalah yang akan dibuat polling, menyusun instrument, menetapkan sampel dan membuat rekomendasi pendapat;
- i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan manajemen komunikasi krisis untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah;
- k. menyiapkan penanganan krisis untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pengelolaan komunikasi krisis untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan evaluasi penanganan komunikasi krisis;
- n. melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- o. melaksanakan pemantauan informasi kebijakan terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah;

- p. menganalisa dan memetakan hasil rekomendasi informasi kebijakan terkait kewenangan daerah untuk menentukan usulan agenda kebijakan daerah, termasuk isu terindikasi krisis;
- q. membuat rekomendasi kebijakan prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kepada pimpinan daerah, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis;
- r. melaksanakan evaluasi dan Pemilihan Isu Publik dengan menganalisa, membandingkan, memetakan hasil monitoring dan menyusun usulan agenda kebijakan serta membuat rekomendasi Isu Terindikasi Krisis.
- s. Mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi Isu Prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis kepada Perangkat Daerah terkait.
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi pengelolaan opini publik dan aspirasi publik;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi sumber daya komunikasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya komunikasi publik;
- c. menyiapkan bahan koodinasi dan kerjasama pemberdayaan sumber daya komunikasi publik;
- d. merencanakan serta melaksanakan *workshop*/lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e. melakukan koodinasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya komunikasi publik di masyarakat;
- g. menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan sumber daya PPID, pejabat fungsional di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. menyusun laporan Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;
- c. menyiapkan bahan koodinasi hubungan kelembagaan lintas sektoral;
- d. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;
- e. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik;
- f. menyiapkan bahan koodinasi dan kerjasama dibidang Kemitraan Lembaga Komunikasi Publik;
- g. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan dan kelompok-kelompok komunikasi sosial sebagai mitra kerja dalam mendiseminasikan informasi publik kepada masyarakat (Kim, media tradisional, komunitas pembuat konten positif dan kelompok strategis);
- h. melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;
- i. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan *workshop*, saresehan, forum dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
- j. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
- k. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
- l. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi;
- m. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi;
- n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengadakan promosi baik di Instansi Pemerintah maupun

- melalui pameran;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi dialog interaktif antara pemerintah dengan kelompok/forum mahasiswa dan kelompok-kelompok/organisasi masyarakat;
- p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan dan mengembangkan organisasi Badan Koodinasi Kehumasan Daerah (BAKOHUMAS) sebagai forum kerjasama antar lembaga untuk pemerintahan;
- q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pertemuan rutin lintas sektoral anggota Badan Koodinasi Kehumasan Daerah (BAKOHUMAS) secara rutin;
- r. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pertemuan tahunan Badan Koodinasi Kehumasan Daerah (BAKOHUMAS) dengan pengurus Badan Koodinasi Kehumasan Daerah Kabupaten/Kota;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan komunikasi publik; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi

Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koodinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan operasional persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan teknologi informasi komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan operasional persandian;

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi komunikasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

1) Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan dan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi, sumber daya persandian, operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah Provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan Provinsi;
- b. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah, sumber daya persandian, proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah, pengiriman/penyimpanan/pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- c. menyiapkan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- d. menyiapkan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak, perangkat keras persandian, dan jaring komunikasi sandi dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah Provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan Provinsi;
- e. menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah Provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan Provinsi;
- f. melaksanakan perancangan pola dan pengoordinasian pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi;
- g. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- h. melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- i. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kegiatan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- j. melaksanakan pengamanan terhadap informasi elektronik;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan dan peraturan teknis terkait dengan audit, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan Provinsi;
- b. melaksanakan identifikasi dan deteksi keamanan siber yang meliputi urusan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko, serta melakukan deteksi ancaman siber milik pemerintah;
- c. melaksanakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah Provinsi yang meliputi urusan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di tingkat pemerintah Provinsi, serta pengoordinasiannya di tingkat daerah, regional dan nasional.
- d. menyelenggarakan literasi keamanan informasi urusan siber milik pemerintah dan publik di Provinsi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi yang menjadi standar bagi penyelenggaraan SPBE;
- b. menyiapkan infrastruktur big data, pusat data dan *disaster recovery center*;
- c. menyiapkan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengimplementasian SPBE;
- d. menyiapkan infrastruktur *cloud computing* dalam mendukung *good government*;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
- f. menyiapkan sarana interoperabilitas system informasi melalui *application protocol interface* Daerah;
- g. menyiapkan sarana inter konektivitas layanan publik dan ke pemerintahan;
- h. penyiapan sarana akses internet dan intranet pada pemerintah daerah dan publik; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- 1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- 2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoodinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

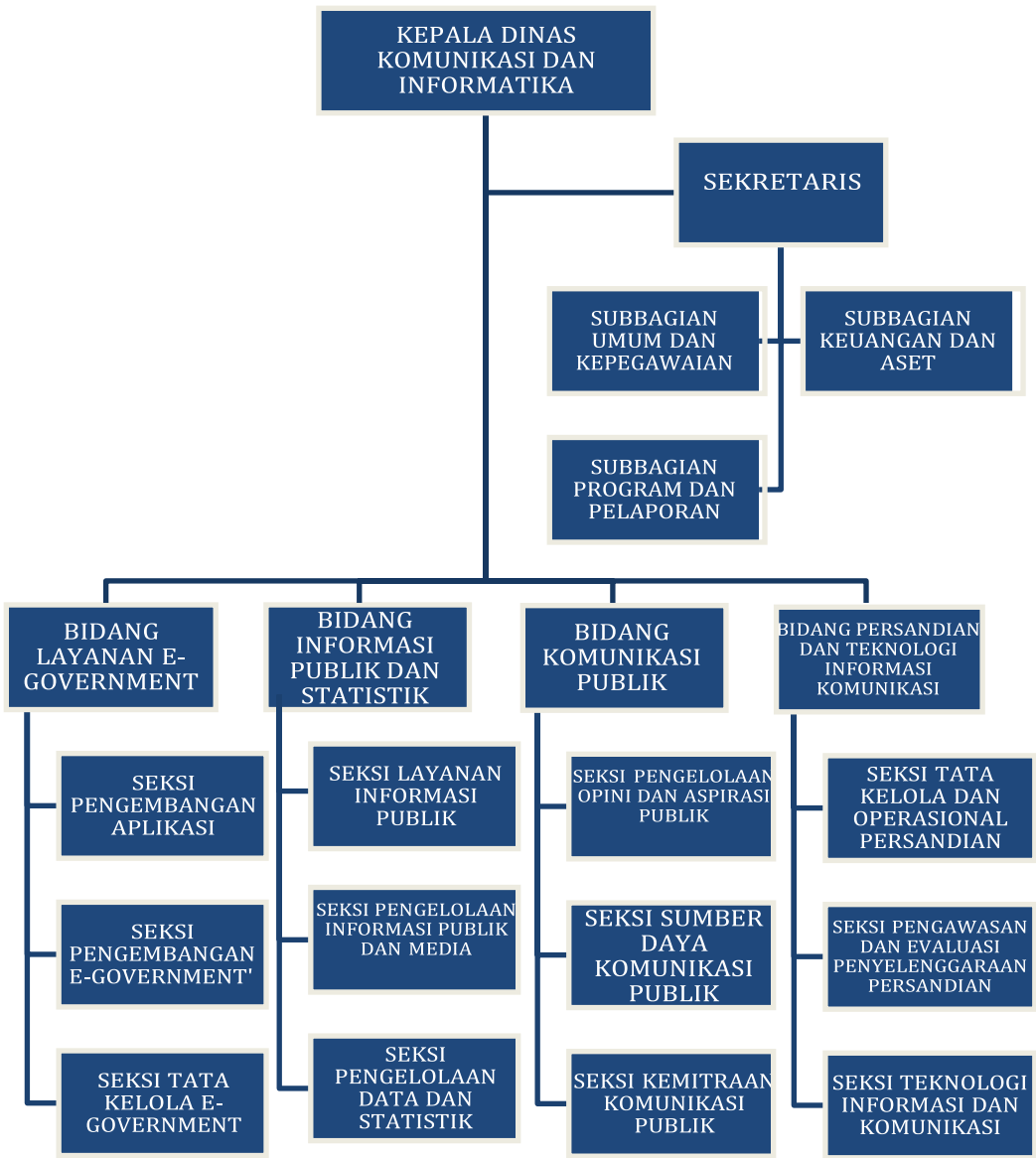
petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing–masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Jambi



Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja yang diamanatkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi didukung oleh kondisi sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dan sumber dana.

2.1.2. Sumber Daya OPD

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi didukung oleh sumber daya aparatur PNS sebanyak enam puluh (enam puluh tiga) orang dan 82 (delapan puluh dua) orang tenaga non PNS. Adapun sumber daya aparatur PNS dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
GolonganIV.e	-	-	-
GolonganIV.d	-	-	-
Golongan IV.c	-	-	1
GolonganIV.b			3
GolonganIV.a			6
Golongan III.d			19
Golongan III.c			14
Golongan III.b			8
Golongan III.a			7
GolonganII.d			2
Golongan II.c			3
GolonganII.b	-	-	
GolonganII.a	-	-	
GolonganI.d	-	-	
Golongan I.c	-	-	-
Golongan I.b	-	-	-
GolonganI.a	-	-	-
TOTAL			63

Tabel 2.2. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.	Strata 2	5	4	8
2.	Strata 1	24	16	41
3.	Diploma 3	9	5	14
4.	SLTA			
	TOTAL	38	25	63

b. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

1) Gedung

Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi beralamat di Jl. Jendral A Yani No.1 Telanaipura Kota Jambi, yang saat ini masih pinjaman dari Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

2) Peralatan dan mesin

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sejauh ini telah cukup memadai untuk menunjang kinerja dan dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada mayoritas berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Aset-aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

NO	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1.	Alat Angkutan	31	Baik
2.	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	875	Baik
3.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	84	Baik
4.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	Baik

5.	Komputer	797	Baik
6.	Gedung dan Bangunan	5	Baik
7.	Jalan, Jatringan dan Irigasi	19	Baik
8.	Aset tidak berwujud	59	Baik
9.	Aset lain-lain	222	Rusak Berat

Sumber: Diskominfo 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.1.3. Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi terdapat beberapa layanan diantaranya:

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

No	indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	target NSPK	target IKK	target indikator lainnya	target renstra perangkat daerah tahun ke-				realisasi capaian tahun ke-				rasio capaian pada tahun ke-			
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo				80	80	85	90	100	100	100	100	125.0	117.6		
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				80	80	85	90	80	90	95		112.5	111.8		
3	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				69	69	69	69	69	69	69		100	100		

No	indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	target NSPK	target IKK	target indikator lainnya	target renstra perangkat daerah tahun ke-				realisasi capaian tahun ke-				rasio capaian pada tahun ke-			
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				100	100	100	100	100	100	100		100.0	100.0		
5	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				100	100	100	100	100	100	100		100.0	100.0		
6	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah					43	45	46		52	58		120.9	128.9		

a. Perangkat Daerah terkoneksi jaringan internet yang Memadai

Seluruh perangkat daerah telah tersambung dan dapat terintegrasi dengan portal internet/intranet dengan bandwidth sebesar 200 Mbps. Sehingga capaian layanan ini sudah mencakup 100% jika dinilai dari jumlah perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan internet. Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan peremajaan peralatan jaringan dengan melakukan pembelian alat berupa Switch Managable, Acces Point, UPS, Server, Firewall, License Firewall, Kabel UTP, Router Mikrotik.

b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Pada Sasaran strategis Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, terdapat Sembilan layanan publik yang diselenggarakan secara online. Layanan tersebut meliputi layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Raden Mataher, Rumah Sakit Jiwa Kolonel Infantri H. Muhammad Syukur, layanan perizinan Sicantik, pembayaran pajak kendaraan bermotor online, pengajuan beasiswa dan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Sistem Informasi Ketenagakerjaan, pemesanan kamar pada Mess Jambi dan Bantuan UMKM.

c. Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi yakni masyarakat berusia 15-64 Tahun yang mendapatkan atau mengetahui informasi publik berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah. penyebaran ini dilakukan melalui berbagai jenis media seperti media online lokal maupun nasional, media cetak lokal dan nasional, media elektronik berupa Televisi dan Radio, media social, dan secara tatap muka. Sampai dengan Tahun 2025 dilakukan penyebaran melalui kerjasama dengan media sehingga dapat memperluas cakupan dan jangkauan masyarakat.

d. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah menggunakan data statistik

Seluruh perangkat daerah telah menggunakan data statistik dalam penyusunan maupun evaluasi pembangunan daerah. Data yang digunakan berupa data statistik dasar/ data statistik sektoral. Namun dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, hanya 80% perangkat daerah yang telah ikut serta mempublikasikan data statistic sectoral pada portal utama Provinsi Jambi.

e. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi Provinsi, dilakukan secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,078	30,175	39,796	21,823	17,763	16,951	28,009	4,996	77	56	70	23		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,590	11,450			5,075	3,070			59	27				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12,564	8,820			11,412	8,820			91	100				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	232,515	172,691	192,787	150,646,800	144,579	172,691	145,488	77,951	62	100	75	52		

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,511,486	9,035,309	9,509,133	10,017,921	8,795,419	8,818,771	9,180,669	4,996,957	92	98	97	50		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	190,874	251,194	280,814	355,354	187,669	250,280	170,206	113,474	98	100	61	32		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,025	6,340	6,000	2,999	7,200	6,180	4,440	1,500	143	97	74	50		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		97,500		-		97,200				100				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	155,078	120,345	309,623	206,008	105,021	112,885	201,677	62,280	68	94	65	30		
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113,001	261,414	169,534	175,539,115	109,427	261,067	141,348	72,970	97	100	83	42		

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,277	37,375	24,960		20,040	33,612	11,877		58	90	48			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38,756	64,248	19,890	9,494	37,413	58,750	8,367	6,519	97	91	42	69		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49,366	63,070	29,204	29,057	45,881	51,650	15,042	7,065	93	82	52	24		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	653,834	735,160	579,758	337,047	517,597	721,947	469,328	214,395	79	98	81	64		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				471,615								0		
Pengadaan Mebel	128,783	179,893		120,042	111,438	179,817		88,084	87	100	#DIV/0!	73		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295,088	381,701	119,050	75,568,483	272,551	37,238	117,875	51,400	92	10	99	68		

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,980	2,200	1,000		1,950	1,860	400,00		98	85	40			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,988,001	2,857,290	1,556,520	15,120	2,976,995	2,854,186	1,543,469	7,021	100	100	99	46		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	16,454	12,939	6,499	9,762	15,698	11,666	3,023	7,271	95	90	47	74		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332,943	406,266	392,560	207,856	261,813	266,802	287,502	55,956	79	66	73	27		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	476,497	168,096	39,270	204,272	446,136	167,237	-	-	94	99	0	0		

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	64,480	70,480		32,404	52,745	55,845		22,557	82	79	#DIV/0!	70		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi														
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik)	394,341	270,987	217,995	274,588	376,436	252,511	165,920	98,486	95	93	76	36		
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	14,525,861	12,730,773	17,229,784	10,194,719,052	14,460,345	12,723,294	17,074,407	3,907,316	100	100	99	38		
Pelayanan Informasi Publik	340,388	284,340	213,034	175,685	318,022	284,340	149,675	85,657	93	100	70	49		
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas)	1,896,644	1,998,186	1,663,150	2,411,349	1,859,804	1,998,186	1,622,309	948,406	98	100	98	39		

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
Informasi Masyarakat)														
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	252,628	210,881	145,999	108,309	226,421	208,755	119,091	47,711	90	99	82	44		
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik)	1,305,000	1,082,401	1,498,072	1,643,980,419	1,273,321	1,071,370	1,468,199	555,491	98	99	98	34		
Penyediaan/Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		264,640				260,540				98				
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi														
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	168,502	90,907	118,063	74,980	147,892	90,410	63,904	32,405	88	99	54	43		
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi														
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	230,635	195,789	128,214	152,178	210,184	195,702	92,441	42,206	91	100	72	28		

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
(Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda)														
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah)	679,087	688,799	600,155	568,344	636,364	643,821	569,446	213,070	94	93	95	37		
Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				350,000				348,540				100		

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE)	7,309,159	6,199,316	11,444	5,381,790	7,196,408	6,096,414	11,055,694	1,936,402	98	98	97	36		
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (Penyelegngaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah)	14,546,075	506,742	469,416	471,202		505,980	458,935	168,859	0	100	98	36		
PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL														
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi														

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Peningkatan Kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral)	320,694	110,171	104,011	23,828	297,495	105,784	96,705	18,924	93	96	93	79		
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional)	181,915	167,883	70,000	84,660	159,405	167,133	61,065	45,949	88	100	87	54		
Membangun Metadata Statistik Sektoral (Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia)	326,886	102,147	50,000	31,053	304,662	96,725	11,926	29,692	93	95	24	96		

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	309,784	223,584	135,569	82,110	308,514	223,573	130,631	59,104	100	100	96	72		
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berdasarkan Elektronik dan Non Elektronik	141,618	84,629	90,000	64,245	136,370	84,498	4,451	38,470	96	100	5	60		
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi	107,239	95,167	18,714	10,039	104,778	94,852	13,885	7,956	98	100	74	79		

uraian	anggaran kas pada tahun ke- (ribu)				realisasi anggaran pada tahun ke- (ribu)				rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (ribu)				rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	anggaran	realisasi
Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	551,176	191,778	170,000	143,166	502,762	191,556	146,795	81,729	91	100	86	57		
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antara Perangkat Daerah Provinsi														
Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		34,930	51,732	18,561		34,930	50,324	14,339		100	97	77		

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mencakup seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Layanan utama yang diberikan meliputi penyediaan jaringan internet, pengelolaan jaringan dan server, serta pengembangan berbagai aplikasi yang mendukung kinerja dan efisiensi pelayanan pemerintahan. Peran ini menjadi krusial dalam memastikan infrastruktur digital yang andal dan aman sebagai fondasi pelaksanaan transformasi digital di sektor pemerintahan.

Selain fungsi teknis tersebut, seluruh Perangkat Daerah juga berperan sebagai mitra dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung penyediaan layanan informasi kepada masyarakat, fasilitasi penyelesaian sengketa informasi, pengelolaan Portal Satu Data Provinsi Jambi sebagai pusat integrasi data, serta diseminasi informasi strategis. Dengan demikian, Diskominfo berperan penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi.

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir terdapat keberhasilan namun juga terdapat berbagai permasalahan yang timbul yakni:

1. Pelayanan Internet belum mencakup UPTD, Sarana Pendidikan, dan Sarana Publik.
2. Meskipun capaian layanan publik secara online sangat baik namun tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik termasuk indikator yang masih dibawah 60 persen;
3. Penyebarluasan Informasi dan kebijakan pemerintah telah dilakukan namun perlu adanya Penyusunan strategi Komunikasi.
4. Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral juga termasuk indikator yang capaiannya masih dibawah 60 persen;
5. Pelaksanaan Keamanan Informasi belum menerapkan Keamanan pribadi dan capaian akan mengalami penurunan akibat penambahan area penilaian Indeks Keamanan Informasi.

2.2.2. Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Digital	Belum optimalnya integrasi layanan digital antar perangkat daerah	Efisiensi penggunaan energi dan sumber daya dalam penyelenggaraan layanan publik	Percepatan transformasi digital dan tuntutan efisiensi birokrasi	Rendahnya kualitas tata kelola digital pemerintah	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Digital	Belum optimalnya integrasi layanan digital antar perangkat daerah
Penguatan Teknologi Pemerintahan Digital	Infrastruktur TIK belum merata dan canggih	Dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur TIK	Perkembangan pesat teknologi digital dan kecerdasan buatan	Kebutuhan pemutakhiran infrastruktur dan SDM digital	Penguatan Teknologi Pemerintahan Digital	Infrastruktur TIK belum merata dan canggih
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Belum optimalnya diseminasi informasi yang transparan dan akuntabel	Akses informasi masyarakat terhadap isu lingkungan	Tuntutan partisipasi publik yang inklusif dan berbasis digital	Lemahnya pengelolaan kanal informasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Belum optimalnya diseminasi informasi yang transparan dan akuntabel
Penguatan Ketersediaan data dan pemanfaatan data	Data sektoral belum terintegrasi dan termutakhirkan	Ketersediaan data lingkungan hidup untuk perencanaan	Tuntutan penggunaan big data dan open data dalam perencanaan	Kurangnya interoperabilitas dan kualitas data	Penguatan Ketersediaan data dan pemanfaatan data	Data sektoral belum terintegrasi dan termutakhirkan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingginya potensi ancaman siber dan belum optimalnya sistem keamanan informasi	Perlindungan data lingkungan dan individu	Meningkatnya intensitas serangan siber dan tuntutan perlindungan data pribadi	Rendahnya kesiapan sistem keamanan siber	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingginya potensi ancaman siber dan belum optimalnya sistem keamanan informasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.1.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-Tahun 2029

Berdasarkan Visi Misi Gubernur Jambi dan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka tujuan Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

“Terwujudnya birokrasi digital yang efektif, transparan, dan berintegritas”

Transformasi layanan publik berbasis digital menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi untuk mewujudkan perbaikan birokrasi. Transformasi digital dapat diartikan sebagai proses holistik yang melibatkan penggunaan berbagai teknologi digital untuk mengubah proses bisnis di pemerintah, industri, maupun masyarakat. Pelaksanaan layanan statistik yang akurat juga menjadi dasar penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data untuk mendukung transformasi digital, hal ini sejalan dengan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data yang melakukan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebaran data serta meta data yang disampaikan oleh Produsen Data. Dengan adanya transformasi digital, Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan layanan berkualitas dan terpercaya dengan menjaga Keamanan Informasi dilingkungan pemerintah daerah. Ukuran yang digunakan untuk melihat tercapainya tujuan ini adalah Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah.

3.1.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan, maka sasaran Perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital, Kualitas Komunikasi Publik, dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah”

Meningkatnya tata kelola digital yang mendukung layanan publik yang efektif dan terintegrasi mencerminkan langkah strategis dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Pengelolaan aplikasi tidak lagi sekadar memastikan sistem berjalan, tetapi menjadi bagian integral dari upaya menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Hal ini

mencakup perencanaan dan pengembangan aplikasi yang sesuai kebutuhan pengguna, pemeliharaan sistem yang adaptif terhadap perubahan, peningkatan keamanan data, serta integrasi antar layanan digital. Dengan pengelolaan yang semakin profesional, aplikasi informatika menjadi tulang punggung transformasi digital pemerintahan, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi kerja dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Hal ini ditandai dengan peningkatan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE).

Kualitas Komunikasi publik pemerintah daerah perlu diukur dengan melihat efektivitas pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik yang dilakukan oleh badan publik. Dengan adanya peningkatan kualitas Komunikasi publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan Informasi, dan Komunikasi publik, mencapai transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan Komunikasi publik. Peningkatan ini dapat tergambarkan dari hasil penilaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia perlu didukung melalui penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data yang optimal. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung agenda transformasi digital pemerintah. Sebagai Wali Data, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi memiliki kewajiban untuk mempublikasikan seluruh data statistik sektoral melalui satu portal data yang terintegrasi. Tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral serta implementasi Satu Data Indonesia (SDI) pada berbagai level pemerintahan diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik.

Tabel 3.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital	Terwujudnya birokrasi digital yang efektif, transparan, dan berintegritas		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	43	45	47	48	49	51	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital, Kualitas Komunikasi Publik, dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	3.30	1.70*	1.70	1.80	1.80	2.00	
			Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks IKP)	71.44	72.50	73	73.50	74	74.50	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.68	3.00	3.00	3.30	3.30	3.60	

Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi, 2025 (diolah)

Keterangan: *Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintahan Digital sehingga target daerah disesuaikan.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang kompeherensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta proyeksi kebutuhan dan tantangan di masa mendatang. Strategi Renstra 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat peran perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap langkah strategis yang dirumuskan harus mampu mendorong sinergi antar unit kerja, menjamin efisiensi pemanfaatan anggaran, serta menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Arah kebijakan Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. perumusan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pemanfaatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan berbasis data yang transparan dan akuntabel di lingkungan perangkat daerah	
2.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2019 tentang	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government	Integrasi kelembagaan dan tatalaksana SPBE antar perangkat daerah	
3.	Norma, Standar, Prosedu, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah	Penerapan kebijakan internal arsitektur SPBE, jaringan intra, sistem penghubung layanan dan kebijakan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Penetapan kebijakan teknis internal terkait TIK, jaringan, dan audit TIK	
4.	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan	Adopsi TIK dalam pemerintahan dan pelayanan publik	Implementasi sistem layanan digital berbasis kebutuhan masyarakat	
5.	Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Menerapkan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, prima dan terjangkau	Pelayanan publik berbasis digital dengan pendekatan <i>user experience</i>	
6.		menerapkan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, dan manajemen TIK dalam rangka meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Menguatkan keamanan informasi serta pengelolaan data, aset, dan infrastruktur teknologi secara terintegrasi untuk mendukung penerapan SPBE	
7.		Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dan manajemen pengetahuan mengenai SPBE	Penguatan literasi digital dan pelatihan SDM perangkat daerah	

8.		Memberikan wadah/ saluran pengaduan bagi masyarakat, yaitu Lapor Wak Dul (Wo Haris dan Pak Dul) (Himpunan Aspirasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat)	Pengelolaan sistem pengaduan berbasis digital: Lapor Wak Dul	
9.		Menginformasikan tahapan pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan (perencanaan, pelaksanaan, hasil) kepada masyarakat melalui website resmi pemerintah sesuai aturan yang berlaku	Pemanfaatan website, media digital, dan kerjasama media untuk sosialisasi tahapan pembangunan	
10.		Fasilitasi akses terhadap jaringan internet	Penyediaan jaringan internet yang handal di seluruh perangkat daerah	
11.		Dukungan fasilitas e-bisnis untuk usaha industri rumah tangga, pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyediaan layanan dan pelatihan e-bisnis berbasis komunitas	
12.		Membangun digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan	Fasilitasi platform digital dan akses layanan keuangan	

Langkah strategis yang diambil tergambar pada penahapan pembangunan yang berisi prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Penahapan renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan pemanfaatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan berbasis data yang transparan dan akuntabel di lingkungan perangkat daerah	Pemanfaatan website, media digital, dan kerjasama media untuk sosialisasi tahapan pembangunan	Integrasi kelembagaan dan tatalaksana SPBE antar perangkat daerah	Implementasi sistem layanan digital berbasis kebutuhan masyarakat	Pelayanan publik berbasis digital dengan pendekatan user experience
Penetapan kebijakan teknis internal terkait TIK, jaringan, dan audit TIK	Menguatkan keamanan informasi serta pengelolaan data, aset, dan infrastruktur teknologi secara terintegrasi untuk mendukung penerapan SPBE	Penyediaan layanan dan pelatihan e-bisnis berbasis komunitas	Penguatan literasi digital dan pelatihan SDM perangkat daerah	Fasilitasi platform digital dan akses layanan keuangan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menetapkan program kerja prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Program kerja prioritas ini terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya birokrasi digital yang efektif, transparan, dan berintegritas				Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital, Kualitas Komunikasi Publik, dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah			1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE). 2. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks IKP). 3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS).		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		1. Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah 2. Persentase Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Meningkatnya pengelolaan Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain dan Sub	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya Manajemen SPBE	Tingkat Kematangan Strategi dan Rencana dan Tata Kelola dan Manajemen	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah Dokumen Kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
				Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
				Meningkatnya penyelenggaraan pusat kendali dan implementasi Provinsi Cerdas	1. Pesentase Pemanfaatan Pusat Kendali oleh Perangkat Daerah 2. Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam implementasi Provinsi Cerdas	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	
				Meningkatnya akses jaringan telekomunikasi kewenangan Provinsi	Persentase penyediaan akses internet dan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		1. Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
					2. Presentase Implementasi Strategi Komunikasi Publik di Pemerintah Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Persentase Informasi Kebijakan dan Produksi Konten yang dipublikasikan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.terverifikasi dewan pers;2.terdaftar di Dinas Kominfo;dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media	
					Jumlah Konten Informasi	Penyusunan Konten	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan mediaberbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Meningkatnya OPD dengan kategori informatif	Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
				Meningkatnya komunikasi publik pemerintah daerah yang efektif, responsif, dan berbasis data aspirasi masyarakat	1. Persentase aduan yang sudah ditindaklanjuti sesuai SOP 2. Persentase peningkatan kapasitas SDM Komunikasi di Pemda 3. Persentase Komunitas Informasi yang dibina oleh dinas	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
					Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	Penyusunan Strategi Komunikasi publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Peningkatan kualitas Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengamanan Informasi	1. Jumlah aplikasi yang sudah diuji keamanan informasi 2. Tingkat Kematangan Keamanan Siber 3. Tingkat kematangan persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya pengelolaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi	
			Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel		1. Nilai AKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian,	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kominfo	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo	Persentase ketepatan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan serta Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya kualitas dan kapasitas pegawai Dinas Kominfo	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Laporan Pelayanan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi Pemeliharaan sesuai Rencana Kebutuhan Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI Outcome : terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (70.15)	BB (75)	14,756,00 0,000	BB (77)	15,352,00 0,000	BB (78)	17,590,00 0,000	A (81)	16,213,00 0,000	A (82)	17,366,00 0,000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	91.12 (A)	B (85)		B (86)		B (87)		B (88)		A (89)		
	Hasil Monev Keterbuaan Informasi Badan Publik Kategori PD	97.9	98		98		98		99		100		
Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kominfo	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kominfo	100%	100%	350,000,0 00	100%	350,000,0 00	100%	350,000,0 00	100%	410,000,0 00	100%	410,000,0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokum en	2 Dokumen	50,000,00 0	2 Dokumen	50,000,00 0	2 Dokumen	50,000,00 0	3 Dokumen	60,000,00 0	2 Dokumen	60,000,00 0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapora n	1 Laporan	300,000,0 00	1 Laporan	300,000,0 00	1 Laporan	300,000,0 00	1 Laporan	350,000,0 00	1 Laporan	350,000,0 00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo	Persentase ketepatan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan serta Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	11,460,00 0,000	100%	11,511,00 0,000	100%	12,362,00 0,000	100%	12,493,00 0,000	100%	12,594,00 0,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	70 Orang	11,000,000,000	70 Orang	11,050,000,000	70 Orang	11,900,000,000	70 Orang	12,000,000,000	70 Orang	12,100,000,000	
Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokum en	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	480,000,000	1 Dokumen	480,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Lapora n	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	11,000,000	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	13,000,000	12 Laporan	14,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Meningkatnya kualitas dan kapasitas pegawai Dinas Kominfo	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	100%	350,000,000	100%	360,000,000	100%	365,000,000	100%	380,000,000	100%	395,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		150 Paket	150,000,000	150 Paket	150,000,000	150 Paket	150,000,000	150 Paket	160,000,000	150 Paket	160,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	200,000,000	25 Orang	210,000,000	25 Orang	215,000,000	25 Orang	220,000,000	25 Orang	235,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum	Laporan Pelayanan administrasi umum	1 Laporan	1 Laporan	898,000,000	1 Laporan	924,000,000	1 Laporan	948,000,000	1 Laporan	1,003,000,000	1 Laporan	1,037,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	60,000,000	2 Paket	63,000,000	2 Paket	66,000,000	2 Paket	70,000,000	2 Paket	73,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	41,000,000	6 Paket	42,000,000	6 Paket	43,000,000	6 Paket	44,000,000	6 Paket	45,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokum en	5 Dokumen	39,000,000	5 Dokumen	39,000,000	5 Dokumen	39,000,000	5 Dokumen	39,000,000	5 Dokumen	39,000,000	
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapora n	12 Laporan	758,000,000	12 Laporan	780,000,000	12 Laporan	800,000,000	12 Laporan	850,000,000	12 Laporan	880,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Lapora n	1 Laporan	708,000,000	1 Laporan	1,199,000,000	1 Laporan	2,395,000,000	1 Laporan	859,000,000	1 Laporan	1,710,000,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	35,000,000	1 Unit	500,000,000	3 Unit	800,000,000	3 Unit	75,000,000	3 Unit	75,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000	1 Unit	900,000,000	3 Unit	75,000,000	1 Unit	900,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	198,000,000	20 Paket	206,000,000	20 Paket	215,000,000	20 Paket	224,000,000	20 Paket	235,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	450,000,000	25 Unit	468,000,000	25 Unit	480,000,000	25 Unit	485,000,000	25 Unit	500,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	310,000,000	100%	445,000,000	100%	465,000,000	100%	480,000,000	100%	490,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapora n	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	165,000,000	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	180,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapora n	1 Laporan	290,000,0 00	1 Laporan	295,000,0 00	1 Laporan	300,000,0 00	1 Laporan	305,000,0 00	1 Laporan	310,000,0 00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi Pemeliharaan sesuai Rencana Kebutuhan Milik Daerah	90%	90%	680,000,0 00	90%	563,000,0 00	90%	705,000,0 00	90%	588,000,0 00	90%	730,000,0 00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit	410,000,0 00	26 Unit	420,000,0 00	27 Unit	430,000,0 00	33 Unit	440,000,0 00	35 Unit	450,000,0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	1 Unit	1 Unit	200,000,0 00	1 Unit	70,000,00 0	1 Unit	200,000,0 00	1 Unit	70,000,00 0	1 Unit	200,000,0 00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	26 Unit	26 Unit	70,000,00 0	60 Unit	73,000,00 0	60 Unit	75,000,00 0	60 Unit	78,000,00 0	60 Unit	80,000,00 0	
PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Outcome : Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	87.43%	88.00%	19,340,00 0,000	88.40%	19,911,00 0,000	88.70%	20,581,00 0,000	88.90%	21,234,00 0,000	90.00%	21,950,00 0,000	
	Presentase Implementasi Strategi Komunikasi Publik di Pemerintah Daerah	0.00%	70.00%		75.00%		80.00%		85.00%		90.00%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi													
Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Persentase Informasi Kebijakan dan Produksi Konten yang dipublikasikan Publik	100%	100%	13,340,000,000	100%	13,856,000,000	100%	14,371,000,000	100%	14,884,000,000	100%	15,400,000,000	
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.terverifikasi dewan pers;2.terdaftar di Dinas Kominfo;dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 laporan	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	158,000,000	1 Laporan	165,000,000	1 Laporan	172,000,000	1 Laporan	180,000,000	
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi	Konten	48 Konten	120,000,000	48 Konten	125,000,000	48 Konten	130,000,000	48 Konten	135,000,000	48 Konten	140,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80%	80%	70,000,000	82%	73,000,000	84%	76,000,000	84%	77,000,000	85%	80,000,000	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan pemanfaatan mediaberbayar sesuai kriteria/juknis	220 Media	220 Media	13,000,000,000	220 Media	13,500,000,000	220 Media	14,000,000,000	220 Media	14,500,000,000	220 Media	15,000,000,000	
Meningkatnya OPD dengan kategori informatif	Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif	39%	55%	2,000,000,000	70%	1,900,000,000	85%	1,970,000,000	93.93%	2,035,000,000	96.96%	2,100,000,000	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	12 Permohonan	400,000,000	12 Permohonan	250,000,000	12 Permohonan	270,000,000	12 Permohonan	285,000,000	12 Permohonan	300,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola KomisiInformas i di Daerah dalam Rangka Penyelesaian SengketaInfor masi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yangakuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 Lapora n	12 Laporan	1,600,000 ,000	12 Laporan	1,650,000 ,000	12 Laporan	1,700,000 ,000	12 Laporan	1,750,000 ,000	12 Laporan	1,800,000 ,000	
Meningkatnya komunikasi publik pemerintah daerah yang efektif, responsif, dan berbasis data aspirasi masyarakat	Persentase aduan yang sudah ditindaklanjuti sesuai SOP	100%	100%	4,000,000 ,000	100%	4,155,000 ,000	100%	4,240,000 ,000	100%	4,315,000 ,000	100%	4,450,000 ,000	
	Persentase peningkatan kapasitas SDM Komunikasi di Pemda	50%	60%		65%		70%		75%		80%		
	Persentase Komunitas Informasi yang dibina oleh dinas	57.89%	69%		72%		75%		78%		81%		
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan	35 Komuni tas	35 Komunita s	3,000,000 ,000	35 Komunita s	3,100,000 ,000	35 Komunita s	3,150,000 ,000	35 Komunita s	3,200,000 ,000	35 Komunita s	3,300,000 ,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Informasi Masyarakat	terdaftar di Dinas Kominfo												
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 rekome ndasi	30 Rekomen dasi	550,000,0 00	30 Rekomen dasi	580,000,0 00	30 Rekomen dasi	595,000,0 00	30 Rekomen dasi	600,000,0 00	30 Rekomen dasi	610,000,0 00	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	120 Orang	120 orang	250,000,0 00	120 orang	265,000,0 00	120 orang	275,000,0 00	120 orang	285,000,0 00	120 orang	300,000,0 00	
Penyusunan Strategi Komunikasi publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	Dokum en	1 Dokumen	200,000,0 00	1 Dokumen	210,000,0 00	1 Dokumen	220,000,0 00	1 Dokumen	230,000,0 00	1 Dokumen	240,000,0 00	
PROGRAM PENGELOLA AN APLIKASI INFORMATIK A	Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	0	1.00	10,038,00 0,000	1.00	10,620,00 0,000	1.00	11,070,00 0,000	1.00	11,562,00 0,000	2.00	12,035,00 0,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	66,7%	73,33%		80.00%		86,66%		93,33%		96,66%		
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi													
Meningkatnya pengelolaan Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	100%	100%	163,000,0 00	100%	173,000,0 00	100%	180,000,0 00	100%	185,000,0 00	100%	190,000,0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokum en	1 Dokumen	163,000,0 00	1 Dokumen	173,000,0 00	1 Dokumen	180,000,0 00	1 Dokumen	185,000,0 00	1 Dokumen	190,000,0 00	
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi													
Meningkatkan Manajemen SPBE	Tingkat Kematangan Strategi dan Rencana dan Tata Kelola dan Manajemen		1.70	645,000,0 00	1.79	687,000,0 00	1.85	710,000,0 00	1.95	727,000,0 00	2.00	740,000,0 00	
Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokum en	1 Dokumen	220,000,0 00	1 Dokumen	230,000,0 00	1 Dokumen	245,000,0 00	1 Dokumen	255,000,0 00	1 Dokumen	260,000,0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	3 Dokum en	3 Dokumen	175,000,0 00	4 Dokumen	200,000,0 00	4 Dokumen	200,000,0 00	4 Dokumen	200,000,0 00	4 Dokumen	200,000,0 00	
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggara an SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Lapora n	1 Laporan	250,000,0 00	1 Laporan	257,000,0 00	1 Laporan	265,000,0 00	1 Laporan	272,000,0 00	1 Laporan	280,000,0 00	
Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Pembangunan/Pe ngembangan Aplikasi	2	1	1,105,000 ,000	1	1,180,000 ,000	1	1,210,000 ,000	1	1,285,000 ,000	2	1,365,000 ,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	19 Aplikasi	10 Aplikasi	755,000,000	10 Aplikasi	800,000,000	10 Aplikasi	815,000,000	10 Aplikasi	880,000,000	10 Aplikasi	950,000,000	
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	17 Layanan	20 Layanan	200,000,000	21 Layanan	225,000,000	22 Layanan	230,000,000	23 Layanan	235,000,000	24 Layanan	240,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggara an Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	8 Aplikas i	9 Aplikasi	150,000,0 00	10 Aplikasi	155,000,0 00	11 Aplikasi	165,000,0 00	12 Aplikasi	170,000,0 00	13 Aplikasi	175,000,0 00	
Meningkatnya penyelenggar aan pusat kendali dan implementasi Provinsi Cerdas	Pesentase Pemanfaatan Pusat Kendali oleh Perangkat Daerah	79%	84%	975,000,0 00	87%	1,080,000 ,000	90%	1,120,000 ,000	93%	1,165,000 ,000	100%	1,190,000 ,000	
	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam implementasi Provinsi Cerdas		3 Kab/Kot a		3 Kab/Kot a		3 Kab/Kot a		3 Kab/Kot a		3 Kab/Kot a		
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikas i	1 Aplikasi	125,000,0 00	1 Aplikasi	130,000,0 00	2 Aplikasi	135,000,0 00	3 Aplikasi	140,000,0 00	4 Aplikasi	145,000,0 00	
Penyelenggara an pusat kendali	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	12 Lapora n	12 Laporan	650,000,0 00	12 Laporan	700,000,0 00	12 Laporan	715,000,0 00	12 Laporan	735,000,0 00	12 Laporan	745,000,0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemerintah Daerah													
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Dokum en	3 Dokumen	200,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	270,000,000	3 Dokumen	290,000,000	3 Dokumen	300,000,000	
Meningkatnya akses jaringan telekomunikasi kewenangan Provinsi	Persentase penyediaan akses internet dan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	50%	65%	7,150,000,000	75%	7,500,000,000	85%	7,850,000,000	90%	8,200,000,000	100%	8,550,000,000	
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perang kat Daerah	34 Perangk at Daerah	7,000,000,000	34 Perangk at Daerah	7,350,000,000	34 Perangk at Daerah	7,700,000,000	34 Perangk at Daerah	8,050,000,000	34 Perangk at Daerah	8,400,000,000	
Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	4 Kabup aten/ Kota	6 Kabupate n/Kota	150,000,000	8 Kabupat en/Kota	150,000,000	9 Kabupat en/Kota	150,000,000	11 Kabupat en/Kota	150,000,000	11 Kabupat en/Kota	150,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Daerah Provinsi													
PROGRAM PENYELENG GARAAN STATISTIK SEKTORAL Outcome : Tercapainya kolaborasi, intergrasi, dan standarisasi dalam penyelenggar aan sistem statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	80%	87%	540,000,000	90%	569,000,000	94%	613,000,000	97%	657,000,000	100%	699,000,000	
Penyelenggar aan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	100%	100%	540,000,000	100%	569,000,000	100%	613,000,000	100%	657,000,000	100%	699,000,000	
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	57.6%	60%	250,000,000	66.70%	260,000,000	72.70%	280,000,000	78.80%	300,000,000	87.80%	320,000,000	
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	57.6%	60%	150,000,000	66.70%	160,000,000	72.70%	175,000,000	78.80%	190,000,000	87.80%	205,000,000	
Peningkatan kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	100%	100%	80,000,000	100%	84,000,000	100%	88,000,000	100%	92,000,000	100%	96,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	60 orang	66 orang	60,000,00 0	66 orang	65,000,00 0	66 orang	70,000,00 0	66 orang	75,000,00 0	66 orang	78,000,00 0	
PROGRAM PENYELENG GARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI Outcome : Meningkatkan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Daerah	58.75%	40%	1,017,000 ,000	45%	1,055,500 ,000	46%	1,095,000 ,000	47%	1,140,000 ,000	48%	290,000,0 00	
Penyelenggar aan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pengamanan Informasi	Jumlah aplikasi yang sudah diuji keamanan informasi	9 Aplika si	4 Aplikasi	767,000,000	4 Aplikasi	795,500,000	4 Aplikasi	825,000,000	4 Aplikasi	860,000,000	4 Aplikasi	890,500,000	
	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	NA	3.17		3.37		3.46		3.66		3.86		
	Tingkat kematangan persandian	NA	3.39		3.59		3.79		3.99		4.1		
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	2 Dokum en	2 Dokumen	38,000,000	2 Dokumen	39,500,000	2 Dokumen	41,000,000	2 Dokumen	43,000,000	2 Dokumen	44,500,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Lapora n	1 Laporan	238,000,000	1 Laporan	248,000,000	1 Laporan	258,000,000	1 Laporan	268,000,000	1 Laporan	279,000,000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Lapora n	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	210,000,000	2 Laporan	220,000,000	2 Laporan	230,000,000	2 Laporan	240,000,000	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian PemerintahDaerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	34 Perang kat Daerah	34 Perangk at Daerah	291,000,000	34 Perangk at Daerah	298,000,000	34 Perangk at Daerah	306,000,000	34 Perangk at Daerah	319,000,000	34 Perangk at Daerah	327,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi													
Meningkatkan pengelolaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	100%	100%	250,000,000	100%	260,000,000	100%	270,000,000	100%	280,000,000	100%	290,000,000	
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	260,000,000	1 Kegiatan	270,000,000	1 Kegiatan	280,000,000	1 Kegiatan	290,000,000	

4.3.Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan program yang telah diuraikan pada sub 4.1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jamb melaksanakan tugas dab fungsi keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yakni membantu Gubernur dalam rangka Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan melalui beberapa Subkegiatan prioritas yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Program	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Ket
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola KomisiInformasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian SengketaInformasi Publik	
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	
			Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalamrangka penyelenggaraan SPBE	
			Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah	

			daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	
			Peningkatan kualitas Statistik Sektoral	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi	

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah periode 2025–2029 sangat ditentukan oleh adanya pemantauan, pengukuran, dan evaluasi yang terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berperan sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana tujuan yang ditetapkan dalam RENSTRA dapat direalisasikan. Dengan penerapan IKU yang jelas dan terukur, perangkat daerah dapat lebih tepat dalam mengarahkan kebijakan, program, serta kegiatan untuk menghasilkan capaian yang optimal. Adapun IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	Nilai	1.70*	1.79	1.88	1.97	2.00	
2.	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks IKP)	Nilai	72.50	73	73.50	74	74.50	

4.5.Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025–2029 memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah berjalan optimal, diperlukan penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan maupun program pemerintah daerah dapat tercapai. Adapun IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	Persentase	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	90	90	95	95	100	
3	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase	80	80	80	80	80	
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100	
5	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase	40	42	42	44	45	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 yang disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat strategis dan terfokus sebagai agenda kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika, persandian dan statistik.

Rencana Strategis memuat isu-isu pokok yang penting, mendasar dan mendesak di bidang komunikasi dan infomatika, persandian dan statistik. Renstra sebagai acuan bagi dokumen perencanaan dimana keberhasilan pelaksanaan RENSTRA diperlukan komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Pelaksanaan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta berorientasi pada peningkatan kinerja sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Kami berharap Renstra yang disusun ini dapat memberikan daya dan hasil guna baik untuk peningkatan akuntabilitas instansi.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
Jl. A Yani No.1, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
Jambi 36361

Telepon: (0741) 6629

Email: info@diskominfo.jambi.go.id

Website: www.diskominfo.jambi.go.id

Hak Cipta © 2025 Diskominfo Provinsi Jambi.
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.